**ANALISIS PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

Melyanus J. Selan¹, Thobias E.D. Tomasowa², Deetje W. Manuain³

^{1,2}Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Kupang

Email: MelyanusSelan@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the procedure for the treasurer's accountability for spending at the Public Works Department and the Spatial Planning District. TTS based on Permendagri No. 13 of 2006 and Permendagri No, 55 of 2008. The analytical method used is descriptive qualitative method, a method that emphasizes the aspects of understanding in depth to a problem. The object of this study is the Financial Administration Officer (PPK), the Technical Implementation Activity Officer (PPTK), the Treasurer of Expenditures and the Treasurer of Assistant Expenditures at the PUPR Service District. TTS. Data obtained by interview and documentation of the object of research. The results of this study indicate that: (1) Treasurer of the Public Works Expenditures of PUPR Kab. TTS has carried out financial accountability procedures in accordance with applicable guidelines, from SP2D disbursement, collection of transaction evidence, bookkeeping to the stage of ratification and submission of reports to related parties; (2) There are 5 (five) factors that become a classic problem in the timeliness of the submission of the accountability report so that it needs to be taken seriously so that it is no longer an obstacle in the submission of the treasurer accountability report.

Keywords: Procedure, Accountability, Treasurer of Expenditures.

PENDAHULUAN

Penatausahaan keuangan daerah berpedoman kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008. Dalam Peraturan tersebut menjelaskan mengenai Penatausahaan Belanja tingkat SKPD yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran harus memahami sistem dan prosedur dalam rangka penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya.

Kendala yang dihadapi beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang mengabaikan prinsip ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh Bendahara Pengeluaran. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Selatan selaku salah satu SKPD Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai data Catatan Atas

Laporan Keuangan (CaLK) tahun anggaran 2018 menjelaskan masalah tidak tepat waktu bendahara menyampaikan surat pertanggungjawaban belanja (SPJ). Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah adalah bagaimana Prosedur Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatiah (2016) menyatakan bahwa SKPD telah melaksanakan penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai permendagri 13 tahun 2006 dan permendagri Nomor 55 tahun 2008. Penelitian

Syafriani (2016) menyatakan bahwa bendahara Pengeluaran menemui kendala perubahan pada sistem dan informasi SKPD mengenai proses pengelolaan keuangan daerah. Frank (2016) menunjukkan bahwa SKPD sudah melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Permana (2013) menyatakan bahwa proses penatausahaan pertanggungjawaban belanja bendahara pengeluaran telah melaksanakan sesuai ketentuan aturan yang berlaku. Nelawati (2009) menunjukkan bahwa SKPD belum dapat mempertanggungjawabkan keuangan secara benar sehingga terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. Hal tersebut membutuhkan Ketepatan dalam menerapkan prosedur pertanggungjawaban belanja yang dilakukan bendahara pengeluaran yang akan menghasilkan nilai guna yang tinggi terutama dalam pencapaian sasaran kinerja suatu fungsi dan Laporan Keuangan yang dihasilkan adalah valid dan tepat guna serta tepat waktu.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara dalam terhadap suatu masalah, daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.

Sumber Data Penelitian terdiri dari: 1) Data Primer dari informan yaitu bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan pejabat penatausahaan keuangan pada Dinas PUPR Kab. TTS, 2) Data Sekunder berupa Laporan Keuangan Dinas PUPR Kab. TTS, Laporan Pertanggungjawaban SPJ Dinas PUPR, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1) Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan, 2) Pertanggungjawaban Penggunaan TU, 3) Pertanggungjawaban administratif, 4) Pertanggungjawaban Fungsional.

Analisis data dengan analisis mendalam (*In-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus, dalam penelitian ini dengan tahapan sebagai berikut .:

- a. Pengumpulan data wawancara kepada bendahara pengeluaran, bendahara pembantu

pengeluaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) serta meneliti dokumen-dokumen yang dipakai dalam proses pertanggungjawaban belanja pada Dinas PUPR Kab. TTS.

- b. Pengolahan data untuk penghalusan data dan selanjutnya perbaikan kata dan kalimat, memberi keterangan tambahan dan membuang keterangan yang tidak penting serta menganalisis sesuai dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis dan disesuaikan dengan teori-teori yang digunakan dalam melakukan penelitian.
- c. Penyajian data Penyajian data pada penelitian ini berbentuk uraian dari rangkuman hasil wawancara dan dokumen yang dihasilkan setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang sekaligus dikaji dengan teori-teori.
- d. Generalisasi dan Kesimpulan Generalisasi yang dibuat harus berkaitan pula dengan teori yang mendasari penelitian yang dilakukan. Setelah generalisasi dibuat, peneliti menarik kesimpulan dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kabupaten TTS telah melaksanakan prosedur pertanggungjawaban belanja sesuai dengan pedoman PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 dan PERMENDAGRI Nomor 55 Tahun 2008. Dalam penyampaian laporan bulanan, laporan semester dan laporan tahunan masih sering terjadi keterlambatan hal ini disebabkan adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam setiap tahapan prosedur pertanggungjawaban belanja. Kebijakan yang diterapkan di Dinas PUPR Kabupaten TTS dalam kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku namun mengabaikan prinsip ketepatan waktu menjadi faktor pemicu masalah dalam tahapan kepatuhan atas sistem dan prosedur tersebut. Identifikasi faktor masalah yaitu Jaringan SIMDA Keuangan Daerah yang sering terganggu, Otorisasi dokumen oleh Pejabat Berwenang yang tertunda, Kesalahan

Sumber Daya Manusia yang bertugas pada bendahara pengeluaran dan bendahara pembantu. Oleh karena itu pengawasan dan evaluasi berkala untuk mengatasi hambatan yang terjadi di SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah (yang mencakup anggaran dan barang, diiringi dengan dana yang dikelola oleh bendahara selaku pejabat fungsional. Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK SKPD) memiliki peranan penting dalam penyusunan akhir Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD). Beberapa kendala yang sering ditemukan dalam penyusunan LK SKPD adalah:

1. Kurangnya tanggungjawab dalam membuat SPJ disetiap transaksi. Terutama dalam penatausahaan belanja, yaitu SPJ Administratif dan SPJ Fungsional. SPJ Administratif disampaikan kepada pengguna anggaran, sedangkan SPJ Fungsional disampaikan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, SPJ Fungsional bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Sehingga jika tidak ada SPJ, maka tidak ada pencatan transaksi keuangan.
2. Mengalami kesulitan dalam pembuatan catatan atas laporan keuangan. Padahal CALK memberikan informasi mengenai berbagai hal yang tidak terbaca dari LRA dan Neraca. CALK tidak hanya merinci lebih jauh rekening-rekening dalam laporan keuangan, tetapi juga menjelaskan berbagai kebijakan, pendekatan, metode, dan dasar penentuan dan penyajian angka-angka LRA dan Neraca. Selain itu, di dalam CALK juga dapat dijelaskan berbagai faktor, asumsi, dan kondisi yang mempengaruhi angka-angka LK.
3. Sisa UP yang belum disetorkan kembali ke Rekening Kas Daerah pada akhir tahun anggaran sering ditemukan pada SKPD.

Pengelolaan SPJ yang tepat waktu merupakan kunci utama dalam ketepatan penyelesaian laporan keuangan. Beberapa dokumen yang harus diperhatikan adalah SPP UP, GU, TU, LS Gaji, LS Barang dan Jasa, SPM UP/GU/TU/LS, Buku Kas Umum, Buku Pembantu, Register SPP/SPM/SP2D, LPJ UP,

LPJ TU, Laporan Penutupan Kas Bulanan, SPJ Administratif dan SPJ Fungsional.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur penatausahaan belanja yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. TTS telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman yang berlaku.
2. Faktor-faktor yang menghambat dalam proses pertanggungjawaban belanja pada Dinas PUPR Kab. TTS terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi masalah klasik, sehingga perlu ditangani secara serius agar tidak lagi menjadi penghambat dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban, antara lain :
 1. Pertanggungjawaban dari masing-masing bendahara pengeluaran pembantu tidak tepat pada waktunya.
 2. Pengaruh sistim jaringan SIMDA yang tidak stabil.
 3. Dalam proses penandatanganan, Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran tidak selalu berada di ruangan.
 4. Tidak adanya jaringan SIMDA di setiap bidang.
 5. Bendahara Pengeluaran Pembantu kurang menguasai sistem komputerisasi.

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas untuk peningkatan Dinas PUPR Kab. TTS disarankan untuk Monitoring dan Evaluasi atas Kinerja SDM dalam hal ini dibagian Bendahara pengeluaran perlu dilaksanakan secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhamad. (2003). *Guru dan Proses Belajar Mengajar Akuntansi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ardiyos. (2005). *Kamus Besar Akuntansi*. Jakarta: Citra Karya Prima.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006.
- Baswir Revrison. (2000). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BFFE.

- Fathansyah. (2002). *Basis Data*. Bandung: Informatika.
- Ihyaul Ulum. MD. (2004). *Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar*. Malang. Universitas Negeri Malang.
- Koentjaraningrat. (2002). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Cetakan ke V.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 55 Tahun 2008 Tentang Proses Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampainya
- Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sekaran, Uma. (2011). *Research Methods for business* Edisi 1 and 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumadji. (2006). *Kasus Ekonomi*. Jakarta WIPRES. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Sumanto.M.A. 1995. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Tanjung, Hafiz, Abdul. *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Buku 1 Edisi 2 Penerbit Salemba Empat
- Tony Wijaya, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Teori dan Praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media
- Skripsi dan Tesis**
- Nelawati, Ivon. (2009). *Kajian Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kab. Lampung Tengah*. (Tesis). Fakultas Ekonomi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Salemba.
- Permana, D. (2013). *Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta*. (Skripsi). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Rahmatiah Dwi Rizky. (2016). *Analisis Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampainya pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone Bolango*. (Skripsi). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Syafriani. (2016). *Analisis Peran Bendahara Pengeluaran Terhadap Pelaksanaan APBD di Kabupaten Rokan Hulu* (Skripsi)
- Zwingly, Frank. (2016). *Analisis Penatausahaan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran serta penyampaiaanya pada Dinas PPKAD Kota Manado* (Tesis). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.